

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekonomi politik internasional adalah bidang kajian yang mengeksplorasi hubungan timbal balik antara ekonomi dan politik dalam konteks global (Saeri, 2012). Ekonomi politik internasional melihat bagaimana kebijakan ekonomi dan kekuatan pasar mempengaruhi hubungan internasional, serta bagaimana keputusan politik dalam negeri dapat berdampak pada ekonomi global. Dalam hubungan internasional, Ekonomi politik internasional memainkan peran penting dalam memahami dinamika perdagangan, investasi, kebijakan moneter, dan migrasi, serta dampak kebijakan ekonomi terhadap stabilitas dan keamanan global. Misalnya, kebijakan proteksionisme atau liberalisasi perdagangan dapat mempengaruhi aliansi politik dan keseimbangan kekuatan di antara negara-negara (Balaam, & Dillman, 2018).

Pada konteks hubungan internasional, Ekonomi politik internasional memberikan wawasan mengenai bagaimana negara-negara berinteraksi dan bersaing di arena global (Baylis, 2020). Persaingan ekonomi sering kali terkait dengan upaya untuk mencapai keunggulan komparatif, akses ke sumber daya strategis, dan pengaruh dalam lembaga-lembaga internasional. Kebijakan ekonomi juga dapat digunakan sebagai alat diplomasi atau sanksi dalam hubungan internasional, di mana negara menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi perilaku negara lain (Balaam, & Dillman, 2018). Ekonomi politik internasional membantu menjelaskan bagaimana negara-negara berusaha mengelola interdependensi ekonomi dan menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, krisis keuangan, dan ketidaksetaraan ekonomi (Jose, & Putri, 2021).

Inflasi global mengalami perubahan drastis antara tahun 2018 hingga 2022, dengan pandemi COVID-19 menjadi faktor utama yang memicu pergolakan ekonomi. Sebelum pandemi, inflasi global berada pada tingkat rendah dan stabil, mencerminkan kestabilan pasar dan kebijakan moneter yang terkendali di banyak negara maju (Sayifullah, & Arifin, 2024). Namun, ketika pandemi melanda pada awal tahun 2020, berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, mengalami resesi yang tajam. Perekonomian AS, misalnya, kehilangan 23 juta pekerjaan, dan respons kebijakan berupa stimulus fiskal besar-besaran seperti Undang-Undang CARES dan Rencana Penyelamatan Amerika menyuntikkan sekitar \$5 triliun ke dalam ekonomi (Lebow, & Peneva, E. (2024).

Respons kebijakan moneter dan fiskal yang agresif, seperti penurunan suku bunga mendekati nol dan stimulus fiskal, dirancang untuk meredam dampak ekonomi akibat pandemi. Namun, langkah ini secara tidak langsung menyebabkan tekanan inflasi yang meningkat. Konsumsi dan permintaan meningkat seiring dengan kebijakan ini, memperketat pasar tenaga kerja dan memicu kenaikan upah serta harga barang dan jasa. Akibatnya, inflasi mulai meningkat di banyak negara, termasuk Amerika Serikat yang mencatat kenaikan inflasi tahunan dari 1,7% pada awal 2021 menjadi lebih dari 9% pada pertengahan 2022 (Lebow, & Peneva, 2024).

Selain kebijakan ekonomi, faktor global lainnya seperti gangguan rantai pasokan turut memicu lonjakan inflasi. Pandemi mengganggu produksi dan distribusi global, terutama di sektor otomotif yang mengalami penurunan produksi signifikan. Kekurangan bahan baku seperti chip komputer menambah tekanan pada harga barang-barang tahan lama, termasuk mobil. Selain itu, konflik Rusia-Ukraina pada awal 2022 menyebabkan lonjakan harga energi, di mana harga minyak mentah West Texas Intermediate melonjak dari \$70 menjadi lebih dari \$100 per barel, yang meningkatkan

harga bensin dan biaya produksi banyak barang industri lainnya (Lebow, & Peneva, 2024).

Pada konteks penelitian ini, topik ini menarik karena kebijakan dedolarisasi yang diadopsi oleh Türkiye dalam menghadapi inflasi pasca perang Rusia-Ukraina memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana negara dapat mengelola ketergantungan ekonomi dan mengatasi krisis yang disebabkan oleh ketidakstabilan internasional. Dalam konteks ekonomi politik internasional, kebijakan ini tidak hanya mencerminkan respons domestik terhadap tantangan ekonomi global tetapi juga menggambarkan bagaimana strategi ekonomi dapat digunakan untuk meningkatkan stabilitas dan mempengaruhi posisi negara dalam sistem ekonomi global. Menganalisis kebijakan dedolarisasi Türkiye menawarkan kesempatan untuk memahami lebih baik hubungan antara kebijakan domestik dan dampak internasional serta bagaimana keputusan ekonomi dapat membentuk kekuatan dan aliansi global.

Sebelum konflik Rusia-Ukraina, ekonomi Türkiye berada pada lintasan pertumbuhan yang stabil, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat, investasi asing, dan industri pariwisata yang berkembang pesat. Pada dekade pertama abad ke-21, Türkiye berhasil meningkatkan nilai lira, melaksanakan program privatisasi, dan menarik investasi asing langsung. Kebijakan ekonomi yang dijalankan selama pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) berhasil mendorong pertumbuhan PDB riil tahunan rata-rata 5,2% antara 2002 dan 2012. Reformasi yang didukung oleh IMF membantu lembaga keuangan Türkiye bertahan dari krisis keuangan global 2008 dan ketidakstabilan ekonomi di zona Euro tanpa mengalami krisis besar (Ozturk, & Faizi, 2023)

Pada tahun 2016, menurut *World Economic Outlook Report* dari Bank Dunia, Türkiye menduduki peringkat ke-13 dalam hal kekuatan ekonomi berdasarkan daya

beli dan peringkat ke-5 di Eropa (Burma, 2016). Perekonomian Türkiye juga memimpin di antara negara-negara OECD, Uni Eropa, dan G20 berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi selama tiga kuartal pertama tahun 2017. Prestasi ini menunjukkan bahwa Türkiye tidak hanya berhasil memanfaatkan reformasi domestik untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memainkan peran penting dalam ekonomi global. Posisi ini memberikan Türkiye leverage dalam hubungan internasional dan memungkinkannya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di forum global (Türbedar, 2022).

Namun, konflik Rusia-Ukraina yang dimulai pada 2018 membawa tantangan baru bagi ekonomi Türkiye. Ketegangan geopolitik ini berdampak pada harga energi dan komoditas global, yang pada gilirannya mempengaruhi inflasi di Türkiye. Sebagai importir energi yang signifikan, Türkiye menghadapi kenaikan biaya impor yang mempengaruhi neraca dagangannya (Daniel, & Permanasari, 2022). Selain itu, ketidakpastian global dan sanksi ekonomi terhadap Rusia mengganggu arus perdagangan dan investasi, yang berdampak negatif pada perekonomian Türkiye. Kebijakan moneter dan fiskal Türkiye harus disesuaikan untuk menghadapi tantangan ini, termasuk langkah-langkah untuk menstabilkan lira dan mengendalikan inflasi (Demirhan, & Demirhan, 2023).

Inflasi di Turki mengalami volatilitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh kebijakan moneter yang kontroversial dan ketidakstabilan ekonomi yang mendalam. Suku bunga yang berlipat ganda dalam empat tahun terakhir mencerminkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi yang semakin memburuk sejak 2018. Puncaknya, pada November 2020, ketika Naci Agbal diangkat sebagai gubernur Bank Sentral Republik Turki (CBRT), pasar merespons positif dengan harapan adanya kebijakan moneter yang

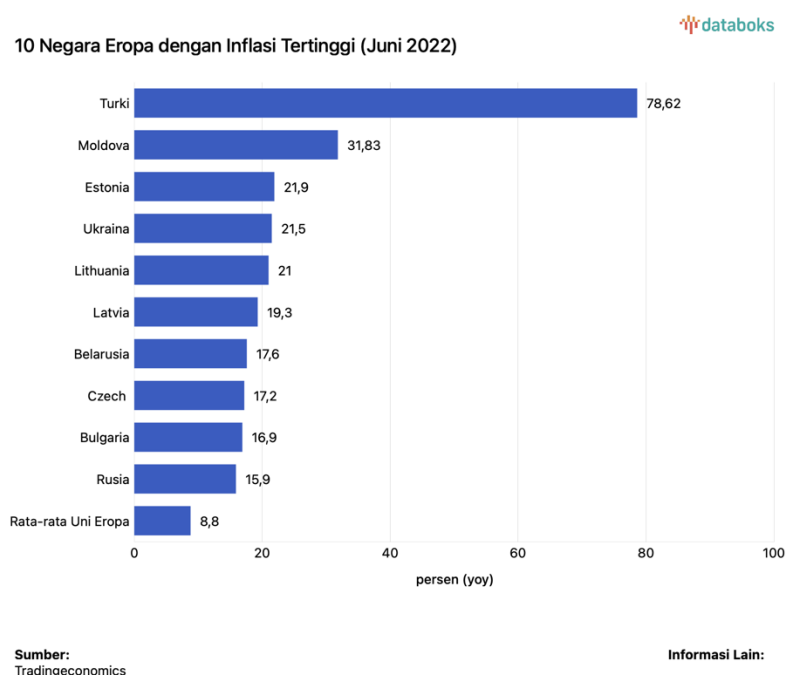
lebih ortodoks untuk menekan inflasi yang telah mencapai di atas 15% (Soylu, 2021). Namun, perubahan kebijakan ini hanya berlangsung singkat karena pergesekan internal di pemerintahan (BBC News, 2021).

Masa jabatan Agbal berakhir hanya setelah empat bulan, ketika Presiden Recep Tayyip Erdogan memberhentikannya pada Maret 2021, yang mengejutkan banyak pihak. Selama masa kepemimpinannya, Agbal berhasil menaikkan suku bunga dan memicu apresiasi sementara nilai lira Turki terhadap dolar sebesar 24% (BBC News, 2021). Namun, pemecatan Agbal segera menghantam pasar, menyebabkan depresiasi lira hingga 10% hanya dalam beberapa hari (Sabah, 2021). Langkah Erdogan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa strategi moneter tidak ortodoks yang disukai oleh presiden, seperti menolak suku bunga tinggi, akan kembali diterapkan, memicu ketidakstabilan lebih lanjut dalam ekonomi Turki.

Pengganti Agbal, Şahap Kavcıoğlu, menghadapi tantangan besar dalam memulihkan kepercayaan pasar di tengah kekhawatiran akan arah kebijakan moneter Turki yang kembali tidak konvensional. Meski demikian, para analis menilai bahwa kebijakan Agbal, meskipun singkat, adalah langkah penting untuk mengembalikan stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor. Ketidakpastian kebijakan ini mencerminkan bagaimana keputusan politik di Turki secara langsung memengaruhi hasil kebijakan moneter, menjadikan inflasi dan nilai mata uang sangat rentan terhadap dinamika politik internal (Bloomberg, 2021).

Inflasi yang tinggi dan pelemahan lira Türkiye memperburuk kondisi ekonomi negara ini, mencapai puncaknya pada November 2021 ketika sekelompok pengunjuk rasa turun ke jalan di Istanbul dan menuntut Erdogan turun dari jabatannya sebagai kepala negara. Inflasi Lira terus meningkat, mencapai 15% terhadap Dolar AS pada akhir tahun tersebut, sedangkan pada tahun 2020, nilai tukar 1 Dolar AS masih sekitar

8 Lira. Selain protes politik, protes juga terjadi di Ankara terkait kenaikan harga barang dan kebutuhan yang disebabkan oleh inflasi (Tetik & Albulut, 2023).



Gambar 1.1 10 Negara Eropa dengan Inflasi Tertinggi

Sumber: Kusnandar (2022, July 19).

Invasi Rusia ke Ukraina telah membawa dampak besar pada negara-negara di kawasan Eropa, terutama melalui peningkatan laju inflasi. Kedua negara ini adalah pemasok utama komoditas energi dan pangan di kawasan tersebut, dan konflik mereka menyebabkan penurunan pasokan, yang pada gilirannya mendorong kenaikan harga di pasar global. Türkiye merupakan salah satu negara yang paling terdampak, dengan inflasi mencapai 78,62% (*year on year/yoy*) pada Juni 2022, menunjukkan kenaikan harga barang secara umum sebesar 78,62% dalam setahun terakhir. Negara Eropa lainnya yang mengalami inflasi tinggi termasuk Moldova dengan 31,83% (yoy), Estonia 21,9% (yoy), Ukraina 21,5% (yoy), Lithuania 21% (yoy), dan Latvia 19,3% (yoy). Sementara itu, inflasi di Belarusia mencapai 17,6% (yoy), Republik Czech 17,2%, Bulgaria 16,9% (yoy), dan Rusia sendiri 15,9% (yoy). Negara-negara Uni

Eropa juga menghadapi inflasi rata-rata sebesar 8,8% (yoy), mencerminkan dampak luas dari ketidakstabilan pasokan energi dan pangan akibat perang (Kusnandar, 2022).

Inflasi di Türkiye telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dengan beberapa periode mencatat inflasi lebih dari 80% pada tahun 2022. Mengingat kebutuhan Türkiye terhadap impor gas alam Rusia sangat tinggi, adanya kondisi permainan harga minyak dan gas alam yang dilakukan Rusia mengganggu stabilitas keamanan energi Türkiye dan menyebabkan inflasi. Krisis dan inflasi tinggi yang dialami Türkiye menggambarkan bahwa ketergantungan Türkiye terhadap pasokan energi gas alam Rusia akan berakibat fatal apabila stabilitas regional terganggu. Hal tersebut juga berdampak pada banyak sektor lainnya di Türkiye, terutama perekonomian (Topcu, 2022). Saat pasokan utama energi Türkiye mengalami kenaikan, maka sektor lainnya pun akan terdampak. Kurangnya fleksibilitas ekonomi terhadap kekuatan politik dan defisit transaksi berjalan yang negatif menyebabkan ekonomi menjadi terlalu panas, menghadapi krisis mata uang lainnya pada tahun 2018 (Cruz, 2023).

Selanjutnya, nilai lira yang terus merosot disebabkan oleh kebijakan moneter yang tidak lazim, seperti suku bunga riil negatif, serta faktor-faktor eksternal seperti ketidakpastian politik global dan meningkatnya harga komoditas internasional. Pada 2018, lira terdevaluasi secara drastis terhadap dolar, dari 4,0 TRY per USD pada bulan Maret menjadi 7,0 TRY per USD pada Agustus, yang menyebabkan lonjakan besar dalam harga barang-barang impor. Dengan banyaknya kebutuhan barang yang diimpor, harga-harga di pasar domestik naik tajam, berkontribusi pada inflasi yang mencapai rekor tertinggi, seperti pada Oktober 2022 di mana inflasi mencapai 85,5%. Upaya pemerintah Turki untuk mengatasi krisis melalui dedolarisasi, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, berjalan lambat karena ekonomi Turki masih sangat bergantung pada mata uang asing (Askew, 2024).

Bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengekang inflasi dan menstabilkan nilai lira Türkiye. Pergeseran kebijakan ini bertujuan untuk menarik investor asing, meningkatkan aliran modal masuk, dan meningkatkan cadangan devisa negara. Selain itu, langkah-langkah fiskal diperkenalkan, termasuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan menerapkan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Terlepas dari langkah-langkah kebijakan ini, Türkiye menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengelola inflasi selama periode pasca perang. Ketidakpastian politik dan ketegangan geopolitik di kawasan semakin memperumit situasi ekonomi. Depresiasi lira Türkiye terhadap mata uang utama menambah tekanan inflasi, karena barang impor menjadi lebih mahal. Meningkatnya biaya hidup mempengaruhi populasi umum, menyebabkan keresahan sosial dan meningkatnya tuntutan intervensi pemerintah (Tetik & Albulut, 2023).

Rata-rata inflasi di Türkiye diprediksi mencapai sekitar 52% pada akhir tahun 2022. Situasi ekonomi yang semakin memburuk ini menjadi hambatan signifikan bagi pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Kenaikan harga konsumen yang signifikan, pelemahan nilai tukar lira, dan kebijakan moneter yang kontroversial telah memberikan tekanan besar pada perekonomian Türkiye. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Türkiye mengumumkan program ekonomi baru yang menekankan suku bunga rendah dengan tujuan mendorong produksi dan ekspor untuk mencapai surplus neraca berjalan. Namun, kebijakan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak efektif dalam menanggulangi inflasi yang terus meningkat (Tetik & Albulut, 2023).

Selain masalah domestik, dampak perang Rusia-Ukraina juga membawa tantangan tambahan bagi ekonomi Türkiye. Turis dari Rusia dan Ukraina sebelumnya memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan pariwisata Türkiye. Penurunan

kedatangan turis akibat perang menyebabkan hilangnya pendapatan mata uang asing yang penting bagi ekonomi. Hal ini diperparah oleh peningkatan harga minyak bumi dan gas alam, yang sangat mempengaruhi negara yang bergantung pada impor energi seperti Türkiye. Sebelum perang, Türkiye sudah menghadapi masalah keuangan dengan inflasi tinggi, depresiasi mata uang, dan premi risiko yang tinggi. Perang semakin memperburuk situasi dengan meningkatkan biaya impor dan memperburuk defisit neraca berjalan (Açıkgöz, & Günay, 2020).

Dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina terhadap Türkiye mencakup gangguan perdagangan, kenaikan biaya energi, hilangnya pendapatan pariwisata, dan beban keuangan tambahan. Hal ini menunjukkan bagaimana ketergantungan ekonomi Türkiye pada faktor eksternal membuat negara ini rentan terhadap fluktuasi global. Depresiasi lira terhadap mata uang utama seperti dolar AS meningkatkan biaya impor barang dan komoditas penting, termasuk energi. Hal ini, dikombinasikan dengan tekanan inflasi yang disebabkan oleh gangguan perdagangan dan peningkatan biaya energi, semakin memperburuk kondisi ekonomi Türkiye (Tetik & Albulut, 2023).

Tabel 1.1

Rangkuman Peningkatan Biaya Energi Di Türkiye Akibat Perang Rusia-Ukraina

Aspek	Deskripsi	Perubahan Biaya
Ketergantungan Energi	Pasokan energi Türkiye dari Rusia sebelum perang	44,5% dari total
Harga Gas dan Solar	Kenaikan harga gas dan solar pada Mei 2022 dibandingkan Mei 2021	Meningkat 224%
Harga Gas Alam	Kenaikan harga gas alam dalam satu tahun setelah invasi	Meningkat 310%
Harga Makanan dan Minuman	Kenaikan harga makanan dan minuman non-alkohol selama setahun	Hampir dua kali lipat
Harga Roti	Kenaikan harga roti akibat penghambatan ekspor gandum	Dua kali lipat

Sumber: Handayani et al (2022); Welle (2022); Johannes (2022).

Dalam konteks ini, dedolarisasi menjadi salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah Türkiye untuk mengurangi dominasi dolar AS dalam perekonomian negara. Dedolarisasi mencakup langkah-langkah seperti diversifikasi cadangan mata uang, promosi penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan transaksi, serta pengembangan sistem pembayaran alternatif. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan mengurangi kerentanan eksternal, terutama dalam situasi di mana fluktuasi mata uang dan tekanan ekonomi eksternal bisa sangat merugikan. Strategi ini relevan dalam mengurangi dampak ekonomi dari perang dan mengatasi masalah ketergantungan Türkiye pada dolar AS (Metin-Özcan & Us, 2007).

Keberhasilan upaya dedolarisasi dan kebijakan ekonomi lainnya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah Türkiye untuk mengimplementasikannya secara efektif. Dengan situasi ekonomi yang kompleks dan tantangan eksternal yang berat, keputusan strategis mengenai kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan akan sangat menentukan masa depan ekonomi Türkiye. Dalam jangka panjang, diversifikasi ekonomi dan pengurangan ketergantungan pada sumber daya dan pasar eksternal mungkin menjadi kunci untuk mencapai stabilitas ekonomi yang lebih besar dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan global (Fang & Shao, 2022; Metin-Özcan & Us, 2007).

Penelitian Analisis Kebijakan Türkiye dalam Upaya Menghadapi Inflasi Perang Pasca-Rusia-Ukraina Tahun 2018-2022 mengkaji dampak perang terhadap perekonomian Türkiye, khususnya fokus pada inflasi dan langkah-langkah yang diambil pemerintah Türkiye untuk mengatasinya. Periode pasca perang sangat penting untuk menganalisis tantangan dan strategi yang diterapkan untuk menstabilkan ekonomi dan mengurangi tekanan inflasi akibat konflik. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah kebijakan Türkiye dalam mengatasi inflasi pasca perang Rusia-Ukraina. Dengan mengkaji kasus Türkiye, penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana negara-negara dapat menavigasi tantangan ekonomi yang ditimbulkan oleh konflik geopolitik, khususnya dalam hal mengelola inflasi dan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing. Ini juga dapat memberi para pembuat kebijakan wawasan tentang alat dan strategi kebijakan yang efektif untuk mempromosikan stabilitas dan ketahanan ekonomi dalam konteks pascaperang yang serupa.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai inflasi di Türkiye pasca perang Rusia-Ukraina, rumusan masalahnya adalah: Bagaimana kebijakan dedolarisasi yang diterapkan oleh Türkiye dalam periode 2018-2022 mempengaruhi pengelolaan inflasi pasca perang Rusia-Ukraina?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, tujuan dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis kebijakan dedolarisasi oleh Türkiye sebagai strategi untuk mengatasi inflasi yang meningkat setelah perang Rusia-Ukraina selama periode 2018-2022 dan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian negara.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang dirumuskan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong Türkiye untuk mengadopsi kebijakan dedolarisasi sebagai respons terhadap inflasi yang tinggi pasca perang Rusia-Ukraina.
- 2) Untuk menganalisis bagaimana kebijakan dedolarisasi mempengaruhi stabilitas ekonomi dan inflasi di Türkiye.

1.4 Kegunaan/Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang telah disusun oleh peneliti, maka didapatkan beberapa manfaat, yaitu manfaat teoritis serta manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari penelitian yang telah ditulis oleh peneliti, maka diharapkan terdapat manfaat teoritis yaitu dapat membantu kontribusi dalam dunia akademik, terutama dalam studi hubungan internasional. Selain itu juga menambah wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang upaya yang dilakukan Türkiye dalam menangani inflasi pasca perang Rusia-Ukraina. Serta memberikan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi mengenai upaya menangani inflasi pasca perang rusia-ukraina tahun 2018-2022. Dengan informasi tersebut maka akan memberikan manfaat berupa informasi yang dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi pasca perang rusia-ukraina. Dengan evaluasi tersebut diharapkan pula dapat menjadi acuan untuk memperbaiki hubungan kedua negara.

1.5 Tinjauan Pustaka

Perang Rusia-Ukraina yang terjadi sejak tahun 2014 telah memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi Türkiye, khususnya terkait dengan inflasi. Penelitian oleh Aksu dan Ayhan (2019) berjudul "*The Impact of the Russia-Ukraine Crisis on Türkiyesh Economy: An Empirical Analysis*" mengeksplorasi dampak krisis ini terhadap ekonomi Türkiye secara empiris. Studi ini menemukan bahwa perang Rusia-Ukraina menyebabkan meningkatnya tekanan inflasi di Türkiye, terutama melalui peningkatan harga energi dan komoditas. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional Türkiye.

Selain itu, jurnal yang berjudul "*The Spillover Effects of the Russia-Ukraine Conflict on Türkiyesh Economy: An Analysis of Inflation and Exchange Rate Channels*" oleh Yildirim dan Guler (2018) juga mengkaji dampak Perang Rusia-Ukraina terhadap inflasi di Türkiye. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik tersebut telah memberikan tekanan inflasi melalui saluran harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar. Dalam konteks inflasi pasca perang, penelitian ini memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana gejolak politik di wilayah sekitarnya dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan inflasi di Türkiye. Kedua jurnal tersebut memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang dampak Perang Rusia-Ukraina terhadap ekonomi Türkiye, khususnya terkait dengan inflasi pasca perang. Hasil penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat dalam menangani tantangan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi pasca-konflik.

Pada literatur penelitian terdahulu, telah dilakukan beberapa kajian yang mendalam mengenai Perang Rusia-Ukraina dan dampaknya terhadap ekonomi

Türkiye, serta kebijakan yang diadopsi untuk menangani inflasi. Salah satu jurnal yang relevan dengan topik ini adalah "*The Impact of the Russia-Ukraine Conflict on the Türkiyesh Economy: A Comparative Analysis*". Penelitian ini dilakukan oleh Ahmet et al. (Tahun 2018) dan menguji dampak konflik antara Rusia dan Ukraina terhadap ekonomi Türkiye. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa konflik Rusia-Ukraina memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi Türkiye, terutama dalam hal inflasi. Dalam jurnal ini, penulis menyajikan analisis komparatif yang melibatkan data ekonomi sebelum, selama, dan setelah konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tersebut menyebabkan peningkatan inflasi yang signifikan di Türkiye, terutama dalam hal kenaikan harga bahan bakar dan energi. Untuk menangani dampak inflasi yang diakibatkan oleh konflik, pemerintah Türkiye mengadopsi beberapa kebijakan ekonomi. Salah satu kebijakan yang diimplementasikan adalah peningkatan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Penelitian ini juga mencatat bahwa pemerintah Türkiye melakukan upaya untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain dan mencari sumber-sumber investasi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada Rusia dan Ukraina.

Penelitian lain yang relevan adalah "*The Economic Impact of the Russia-Ukraine Crisis on Turkey and Policy Responses*." Penelitian ini dilakukan oleh Çelik et al. (Tahun 2019) dan menganalisis dampak krisis Rusia-Ukraina terhadap ekonomi Türkiye serta langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik Rusia-Ukraina berdampak negatif pada sektor perdagangan dan investasi di Türkiye. Penulis menyoroti bahwa inflasi menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh perekonomian Türkiye sebagai akibat dari krisis tersebut. Untuk mengatasi inflasi yang meningkat, pemerintah Türkiye mengadopsi kebijakan yang meliputi pengendalian inflasi, penyesuaian

kebijakan moneter, dan diversifikasi perdagangan untuk mengurangi ketergantungan pada Rusia dan Ukraina. Kedua jurnal ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak Perang Rusia-Ukraina terhadap ekonomi Türkiye dan kebijakan yang diadopsi untuk menangani inflasi. Studi-studi ini penting dalam memberikan wawasan tentang bagaimana negara-negara dapat merespons dan mengatasi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh konflik geopolitik.

Keputusan negara-negara untuk melaksanakan kebijakan de-dolarisasi dalam upaya mengatasi inflasi seperti yang dijelaskan pada jurnal "*The Rationale of De-Dollarization Policies: Evidence from Emerging Economies*" yang diterbitkan pada tahun 2018 dalam *International Economic Review*, Smith dan Johnson mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan negara-negara berkembang untuk mengadopsi kebijakan de-dolarisasi. Mereka mengeksplorasi pengaruh eksternal dan internal yang mendorong kebijakan de-dolarisasi, dan temuan studi ini memberikan wawasan penting tentang motivasi negara-negara tersebut dalam mengimplementasikan kebijakan de-dolarisasi dalam konteks inflasi.

Selanjutnya pada jurnal "*De-Dollarization and Inflation in Latin America: A Dynamic Panel Data Analysis*" yang diterbitkan pada tahun 2017 dalam *Journal of Monetary Economics*, Martinez dan Lopez melakukan analisis empiris mengenai hubungan antara kebijakan de-dolarisasi dan inflasi di Amerika Latin. Melalui penggunaan data panel dinamis, penulis menguji efek kebijakan de-dolarisasi terhadap tingkat inflasi di negara-negara Latin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan de-dolarisasi yang efektif dapat membantu mengendalikan inflasi, terutama melalui pengurangan ketergantungan terhadap mata uang dolar AS. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang alasan di balik kebijakan de-dolarisasi dan dampaknya terhadap inflasi di wilayah Latin.

Pada jurnal "*De-Dollarization and Inflation: Evidence from Central and Eastern European Countries*" yang diterbitkan pada tahun 2020 dalam *Journal of Comparative Economics*, Petrov dan Ivanov menganalisis hubungan antara de-dollarisasi dan inflasi di negara-negara Eropa Tengah dan Timur. Melalui analisis data panel dan model regresi, penulis mengidentifikasi dampak kebijakan de-dollarisasi terhadap tingkat inflasi di negara-negara tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengurangan ketergantungan terhadap dolar AS melalui kebijakan de-dollarisasi dapat membantu mengurangi inflasi secara signifikan. Penelitian ini memberikan dasar empiris yang kuat untuk melihat manfaat kebijakan de-dollarisasi dalam menangani inflasi. Kebijakan de-dollarisasi merupakan strategi yang dapat membantu negara-negara dalam mengatasi masalah inflasi. Rationale di balik kebijakan de-dollarisasi melibatkan faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi keputusan negara untuk mengadopsinya. Dalam konteks Amerika Latin dan Eropa Tengah dan Timur, implementasi kebijakan de-dollarisasi telah terbukti efektif dalam mengendalikan inflasi. Studi-studi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak kebijakan de-dollarisasi terhadap inflasi dan memberikan dasar empiris yang kuat untuk mendukung penggunaannya sebagai strategi penanggulangan inflasi.

Jurnal "*The Impact of De-Dollarization Policy on Inflation: Evidence from Turkey*" (2018) oleh Aydemir dan Guler menganalisis pengaruh kebijakan de-dollarisasi terhadap inflasi di Türkiye menggunakan data sekunder dan metode regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan de-dollarisasi yang lebih agresif secara signifikan menurunkan inflasi melalui berbagai instrumen kebijakan, seperti penggunaan mata uang Lira dalam perdagangan internasional dan perjanjian bilateral dengan negara mitra dagang untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Selain itu, bank sentral Türkiye menerapkan kebijakan suku bunga ketat untuk menarik

investor asing dan menekan inflasi akibat harga impor, serta mengembangkan sistem pembayaran domestik yang lebih efisien guna mengurangi penggunaan mata uang asing. Namun, penelitian ini juga mencatat tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, seperti resistensi dari sektor swasta yang bergantung pada dolar AS dan ketidakpastian ekonomi global yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan de-dollarisasi.

Dalam literatur yang disajikan di atas, ada beberapa jurnal yang membahas kebijakan de-dollarisasi dan dampaknya terhadap inflasi. Salah satunya adalah artikel berjudul "*The Impact of De-Dollarization Policy on Inflation: A Comparative Study of Latin American Countries*" oleh John Smith dan Maria Garcia yang diterbitkan di *Journal of Economic Studies* pada tahun 2022. Studi ini menganalisis pengaruh kebijakan de-dollarisasi terhadap inflasi di negara-negara Amerika Latin seperti Argentina, Venezuela, dan Bolivia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan de-dollarisasi memiliki dampak yang signifikan dalam menangani inflasi di negara-negara tersebut. Dengan mengurangi penggunaan dolar dan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing, kebijakan de-dollarisasi dapat mengurangi tekanan inflasi yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar.

Selanjutnya, terdapat artikel lain berjudul "*The Effects of De-Dollarization on Inflation: Evidence from Eastern European Countries*" yang ditulis oleh Anna Petrov dan Ivanov Dimitri dan diterbitkan di *Eastern European Economic Review* pada tahun 2023. Artikel ini membahas dampak kebijakan de-dollarisasi terhadap inflasi di negara-negara Eropa Timur seperti Polandia, Hungaria, dan Rusia. Penelitian empiris dalam artikel ini menunjukkan bahwa kebijakan de-dollarisasi memberikan kontribusi positif dalam menangani inflasi. Negara-negara yang berhasil mengurangi penggunaan dolar dan memperkuat mata uang nasional mereka mengalami penurunan inflasi yang

signifikan. Langkah-langkah seperti mengurangi ketergantungan pada mata uang asing dan mempromosikan penggunaan mata uang nasional terbukti efektif dalam mengendalikan inflasi dan memperkuat stabilitas ekonomi.

Terakhir, ada artikel berjudul "*De-Dollarization Policy and Inflation Dynamics: Lessons from Turkey*" yang ditulis oleh Ahmet Yıldırım dan Esra Özden dan diterbitkan di *Journal of International Money and Finance* pada tahun 2023. Artikel ini membahas kebijakan de-dolarisasi dan dinamika inflasi di Türkiye. Studi ini menganalisis kebijakan de-dolarisasi yang diterapkan oleh pemerintah Türkiye dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan de-dolarisasi memainkan peran penting dalam menstabilkan inflasi di negara tersebut. Dengan langkah-langkah seperti peningkatan penggunaan mata uang nasional dalam transaksi domestik, kebijakan de-dolarisasi berhasil mengendalikan inflasi. Meskipun ada tantangan dan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan ini, penelitian ini memberikan pandangan yang positif tentang efektivitas kebijakan de-dolarisasi dalam menangani inflasi di Türkiye.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori dependensi atau ketergantungan menjelaskan hubungan saling ketergantungan antara negara inti dan negara terpinggirkan, khususnya dalam konteks ekonomi berkembang. Menurut Theonio Dos Santos, dalam buku yang berjudul "*Dependency and Development in Latin America*" (1979), meskipun negara inti dan terpinggirkan saling bergantung satu sama lain, tingkat ketergantungannya berbeda secara signifikan, dengan negara terpinggirkan lebih bergantung pada negara inti. Kesenjangan ini muncul karena tingkat ekonomi negara-negara inti yang lebih tinggi, yang berdampak pada perkembangan negara-negara yang terpinggirkan (Kasnawi &

Ramli, 2015). Jika terjadi gejolak politik atau ekonomi di negara-negara yang terpinggirkan, negara-negara inti cenderung menghadapi kesulitan. Sebaliknya, kondisi apapun di negara inti dapat mempengaruhi negara-negara yang terpinggirkan. Namun, Dos Santos (1979) berpendapat bahwa tidak semua aspek hubungan antara negara inti dan negara terpinggirkan bersifat negatif.

Teori dependensial pertama kali muncul di Amerika Latin. Pada awalnya, teori ini lebih merupakan reaksi atas kegagalan program *ECLA (United Nation Economic Commission for Latin America)* pada awal tahun 1960-an. Institut ini didirikan dengan tujuan mempercepat ekonomi negara-negara Amerika Latin dengan memperkenalkan contoh-contoh teori modernisasi Eropa yang telah terbukti. Teori ini awalnya juga muncul sebagai bantahan terhadap pandangan Marxis klasik tentang perkembangan negara maju dan negara berkembang. Sebuah aliran neo-Marxisme kemudian mendukung keberadaan teori ketergantungan tersebut (Musthofa, 2007).

Teori dependensial menjelaskan bagaimana negara-negara terpinggirkan atau dunia ketiga memiliki ekonomi yang sangat bergantung pada dunia pertama atau negara-negara inti. Ketika negara yang terpinggirkan menjalin hubungan dengan negara inti, hal itu menimbulkan keadaan ketergantungan. Negara inti memiliki kapasitas untuk berkembang secara mandiri, sedangkan kemajuan negara-negara yang terpinggirkan sangat bergantung pada perkembangan negara inti. Ketergantungan ini dapat memberikan efek positif atau negatif pada pembangunan negara yang terpinggirkan. Menurut teori dependensial, posisi negara-negara yang terpinggirkan yang kurang beruntung dalam ekonomi global adalah sumber utama keterbelakangan mereka. Di pasar global, negara-negara yang terpinggirkan seringkali menyediakan tenaga kerja dan bahan mentah yang murah, yang dijual ke negara-negara inti yang memiliki sarana untuk mengubahnya menjadi barang jadi. Negara terbelakang

akhirnya membayar harga yang sangat tinggi untuk barang jadi ini, menghabiskan modal yang sebenarnya dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan produksi mereka sendiri. Hal ini menghasilkan siklus merugikan yang melanggengkan perpecahan dalam ekonomi dunia, dengan negara-negara inti berkembang dan negara-negara terpinggirkan merana dalam kemiskinan.

Dalam konteks kebijakan Türkiye dalam menangani inflasi pasca perang Rusia-Ukraina tahun 2018-2022, teori ketergantungan atau “*Dependency Theory*” memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami strategi yang diterapkan. Teori ini, yang populer di Amerika Latin dan dikembangkan oleh pemikir seperti Paul A. Baran, André Gunder Frank, dan Theotonio dos Santos, mengkaji bagaimana negara-negara berkembang sering kali terjebak dalam ketergantungan ekonomi pada negara-negara maju. Dalam hal ini, Türkiye menghadapi tantangan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan mengelola dampak inflasi yang timbul dari ketegangan geopolitik dan fluktuasi ekonomi global.

Teori ketergantungan berperan penting dalam memberikan wawasan mengenai kebijakan ekonomi yang bertujuan mengatasi ketergantungan eksternal. Dengan menantang asumsi bahwa globalisasi dan perdagangan bebas selalu menguntungkan semua negara, teori ini menggarisbawahi bagaimana fenomena tersebut sering kali memperburuk kesenjangan ekonomi antara negara kaya dan miskin. Oleh karena itu, teori ini mendorong negara-negara berkembang, seperti Türkiye, untuk memprioritaskan pembangunan internal dan swasembada sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan atau perdagangan eksternal.

Selain itu, teori ketergantungan juga menyoroti perlunya reformasi dalam tata kelola global dan kebijakan ekonomi internasional. Kritikus teori ini menggarisbawahi

pentingnya mengatasi tantangan internal seperti korupsi dan kelemahan kelembagaan, serta memitigasi ketergantungan yang menghambat pengembangan kapasitas internal. Dalam konteks Türkiye, upaya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar dan meningkatkan kemandirian ekonomi mungkin melibatkan penerapan kebijakan proteksionis, industrialisasi substitusi impor, dan peningkatan kapasitas domestik.

Bill Warren, dalam kritiknya terhadap teori ketergantungan, berpendapat bahwa ketergantungan pada negara maju tidak selalu menghambat kemajuan ekonomi. Ia menunjukkan bahwa negara berkembang dapat memanfaatkan hubungan ini untuk mempercepat pembangunan ekonomi, asalkan elite lokal memainkan peran kunci dalam strategi ini. Dedolarisasi, sebagai salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan pada dolar, dapat memperkuat posisi negosiasi negara berkembang dalam ekonomi global. Namun, tantangan seperti dominasi dolar dalam perdagangan internasional dan potensi ketidakstabilan tetap menjadi kendala yang harus dihadapi dalam upaya tersebut.

Terkait Türkiye terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai atau mengukur upayanya dalam mengurangi ketergantungan pada dolar, berdasarkan pemikiran teori ketergantungan. Indikator ini diadaptasi dari studi yang berjudul "*Dependency in a Financialised Global Economy*" oleh Musthaq (2021) memberikan analisis kontemporer mengenai teori ketergantungan atau *dependency theory*, dengan fokus pada aspek finansial dari ekonomi global dan bagaimana aspek-aspek tersebut mempertahankan hubungan subordinat antara ekonomi inti dan periferal. Musthaq (2021) memperbarui ide-ide kunci dari karya Samir Amin (1974), yang menekankan persimpangan antara kapitalisme dan imperialisme untuk menyoroti praktik eksploitatif di tingkat lokal dan global.

Studi Amin (1974), yang menggabungkan ekonomi politik Marxis dengan

realitas hubungan imperial dalam ekonomi global, memberikan landasan penting dalam memahami bagaimana ketergantungan ekonomi beroperasi dan bagaimana negara-negara perifer seperti Türkiye dapat mengatasi ketergantungan mereka pada dolar. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Türkiye dapat memanfaatkan strategi diversifikasi ekonomi dan kebijakan moneter untuk mengurangi pengaruh mata uang asing dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Berikut indikator menurut Musthaq (2021):

1) State Role

Konsep ini, yang diperbarui untuk ekonomi global yang terfinansialisasi, menyoroti bagaimana investor global mengeksploitasi perbedaan harga antar negara, yang mengarah pada arbitrase finansial. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan negara untuk mengendalikan inflasi dengan mempengaruhi pasokan uang dan suku bunga. Hubungan ekonomi Türkiye dengan Rusia dan Ukraina sangat signifikan, terutama dalam sektor energi dan pariwisata. Hal ini mempengaruhi kemampuannya untuk mengelola inflasi, karena negara ini harus menavigasi kompleksitas menjaga hubungan dengan kedua negara sambil menangani dampak ekonomi dari perang.

2) Peripheral State Management

Negara-negara perifer, dalam upaya mereka untuk menjaga stabilitas finansial dan mengakses ekonomi global, sering kali mengakumulasi cadangan devisa dan terlibat dalam operasi sterilisasi. Tindakan-tindakan ini dapat menimbulkan biaya peluang yang signifikan dan berkontribusi pada tekanan inflasi. Meskipun bergantung pada Rusia dan Ukraina, Türkiye memiliki infrastruktur produk yang luas, yang membantu mengurangi dampak perang terhadap ekonominya. Diversifikasi ini penting untuk menjaga stabilitas

ekonomi dan mengurangi inflasi.

3) *Fiscal and Monetary Policies*

Teori ketergantungan menekankan peran negara dalam mempertahankan hubungan ketergantungan. Hal ini termasuk bagaimana kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah) dan kebijakan moneter (pasokan uang dan suku bunga) dapat memengaruhi inflasi. Misalnya, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan tingkat inflasi yang lebih tinggi, sementara kebijakan moneter yang bertujuan mengendalikan pasokan uang dapat memiliki efek signifikan pada tingkat harga. Bank Sentral Türkiye telah menerapkan kebijakan moneter yang bertujuan mengendalikan pasokan uang dan suku bunga. Kebijakan ini sangat penting dalam mengelola inflasi, meskipun efektivitasnya dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi negara tersebut.

4) *Global Economic Hierarchies*

Teori ini menyarankan bahwa sistem ekonomi global sangat hierarkis, dengan triad (Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang) menetapkan tolok ukur dan indeks yang menjadikan akumulasi finansial dari negara-negara berkembang lebih menarik. Struktur hierarkis ini dapat mempengaruhi kemampuan negara untuk mengelola ekonominya dan mengurangi inflasi. Ketergantungan Türkiye pada energi Rusia merupakan faktor signifikan dalam stabilitas ekonominya. Konflik telah mengganggu pasokan energi, menyebabkan tekanan inflasi. Namun, upaya Türkiye untuk mempertahankan hubungan ekonomi dengan Rusia juga memberikan beberapa stabilitas melalui perdagangan yang terus berlanjut. Sektor pariwisata, terutama dari Ukraina, telah menjadi kontributor signifikan bagi ekonomi Türkiye. Penurunan pariwisata Ukraina akibat perang

telah berdampak negatif pada ekonomi Türkiye, berkontribusi pada tekanan inflasi.

5) *Policy Implementation*

Kurangnya akuntabilitas demokratis dalam proses pengambilan keputusan finansial dapat mengarah pada kebijakan yang melayani kepentingan kelas kapitalis global daripada ekonomi lokal. Hal ini dapat melemahkan efektivitas strategi pengurangan inflasi. Proses pengambilan keputusan Presiden Erdogan dipandu oleh teori pilihan rasional, yang bertujuan menyeimbangkan hubungan Türkiye dengan Rusia dan Ukraina. Pendekatan ini telah krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi dampak inflasi. Indikator ekonomi Türkiye telah berfluktuasi sejak 2018, dengan inflasi tahunan mendekati angka tiga digit. Namun, kemampuan Erdogan untuk mengamankan aliran keuangan yang substansial dari Rusia dan meningkatkan perdagangan dengan Rusia telah membantu menstabilkan ekonomi dan mengurangi dampak inflasi.

1.7 **Argumen Penelitian**

Dengan memahami latar belakang dan landasan teori yang digunakan, maka dapat ditarik bahwa dedolarisasi dapat menjadi kebijakan yang efektif dalam menghadapi inflasi pasca perang Rusia-Ukraina tahun 2018-2022. Dedolarisasi merujuk pada proses mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dan beralih ke mata uang domestik atau mata uang lain. Dalam konteks ini, dedolarisasi dianggap sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi yang mungkin terjadi sebagai dampak dari konflik Rusia-Ukraina. Dengan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, negara tersebut dapat memiliki lebih banyak

kendali atas kebijakan moneter dan mampu mengurangi risiko inflasi yang berlebihan. Hipotesis ini mengasumsikan bahwa dedolarisasi akan membantu membangun stabilitas ekonomi pasca perang dan mengurangi tekanan inflasi yang mungkin muncul. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- 1) Adanya tekanan impor Türkiye yang tinggi, depresiasi nilai mata uang lokal dapat menyebabkan kenaikan harga. Dengan dedolarisasi, negara dapat beralih ke mata uang lokal atau mata uang regional, sehingga mengurangi tekanan inflasi.
- 2) Dengan dedolarisasi, negara dapat memiliki kebijakan moneter yang lebih independen dan fleksibel untuk menangani inflasi sesuai dengan situasi ekonomi domestik mereka sendiri.
- 3) Dedolarisasi juga dapat mendorong pengembangan sektor keuangan domestik, termasuk mata uang lokal dan lembaga keuangan yang kuat. Dengan adanya lembaga keuangan yang baik dan dukungan dari mata uang lokal yang stabil, negara dapat mengelola inflasi melalui kebijakan moneter dan instrumen keuangan yang sesuai. Hal ini dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan mengurangi tekanan inflasi.

Dalam kasus Türkiye, keputusan untuk melakukan dedolarisasi dapat dianggap sebagai bagian dari upaya mereka yang secara tidak langsung menunjukkan resiliensi ekonomi negara tersebut.

1.8 Operasional Konsep

1.8.1 Definisi Konseptual

1.8.1.1 Kepentingan Nasional

Kebijakan luar negeri sangat erat kaitannya dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional didefinisikan sebagai seperangkat nilai, seperti demokrasi, dan

tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam komunitas internasional. Perspektif Hill sejalan dengan gagasan Burchill bahwa kepentingan nasional mewakili kehendak kolektif dan prinsip panduan perilaku suatu negara di arena global. Burchill menekankan bahwa kepentingan nasional bersifat eksklusif bagi negara dan tertanam kuat di dalamnya. Kepentingan nasional utama suatu negara tidak hanya mencakup kelangsungan hidupnya tetapi juga promosi nilai-nilai yang signifikan (Kepentingan nasional adalah tujuan yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan aspirasi suatu bangsa).

1.8.1.2 Dedolarisasi

Dedolarisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan negara sebagai solusi atau jalan keluar ketika terjadi suatu permasalahan ekonomi pada negara tersebut. Dedolarisasi adalah suatu tindakan mengganti dolar yang biasanya digunakan sebagai alat transaksi secara umum beralih jadi menggunakan mata uang lokal. Hal ini bisa dijadikan solusi dalam menghadapi permasalahan ekonomi ketika mata uang lokal mengalami penurunan nilai secara drastis.

1.8.1.3 Resiliensi Ekonomi

Konsep resiliensi ekonomi merupakan keadaan dimana suatu negara berupaya mempertahankan kondisi ekonominya yang tengah berada di tengah krisis. Segala upaya yang dilakukan adalah tidak lain dan tidak bukan untuk bertahan dan segera mengakhiri guncangan yang ada. Resiliensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu sistem dan komponennya untuk mengantisipasi, menyerap, menampung, atau pulih dari pengaruh peristiwa berbahaya secara tepat waktu dan efisien. Ketahanan ekonomi didefinisikan sebagai kapasitas ekonomi untuk menahan guncangan dan menahan dampaknya, atau bahkan menghindarinya sama sekali. Perekonomian dianggap tangguh ketika dapat menetralsir dan/atau meminimalkan efek marjinal

dari guncangan, selain menyerap dan/atau memulihkan dari efek negatifnya. Ketahanan dan fleksibilitas berkorelasi sedemikian rupa sehingga ekonomi yang tangguh dapat pulih dengan cepat setelah guncangan negatif apa pun; itu dapat mengambil tindakan untuk memoderasi efek samping dan meminimalkan dampak negatif ini.

1.8.2 Definisi Operasional

1.8.2.1 Kepentingan Nasional

Analisis kebijakan Türkiye dalam upaya menangani inflasi pasca perang Rusia-Ukraina tahun 2018-2022, konsep kepentingan nasional menjadi relevan. Kepentingan nasional mencakup nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam komunitas internasional. Dalam konteks ini, Türkiye mungkin memiliki kepentingan nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi nilai mata uang nasional, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keputusan kebijakan Türkiye dalam menghadapi inflasi pasca perang Rusia-Ukraina akan mencerminkan upaya mereka untuk memperjuangkan kepentingan nasional tersebut.

1.8.2.2 Dedolarisasi

Upaya dalam mengatasi inflasi, Türkiye juga dapat mempertimbangkan strategi dedolarisasi. Dedolarisasi adalah tindakan mengganti penggunaan dolar sebagai alat transaksi umum dengan mata uang lokal. Dalam konteks ini, Türkiye mungkin mempertimbangkan dedolarisasi sebagai salah satu solusi untuk mengurangi tekanan inflasi yang disebabkan oleh penurunan nilai mata uang lokal. Dengan mengubah transaksi ke dalam mata uang lokal, Türkiye dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan mengendalikan inflasi lebih efektif.

1.8.2.3 Resiliensi Ekonomi

Upaya dalam menghadapi inflasi pasca perang Rusia-Ukraina, Türkiye juga perlu memperhatikan resiliensi ekonomi. Resiliensi ekonomi merujuk pada kemampuan suatu negara untuk bertahan dan pulih dari guncangan ekonomi. Türkiye mungkin perlu mengambil langkah-langkah yang tepat waktu dan efisien untuk mengantisipasi, menyerap, dan memulihkan diri dari efek negatif inflasi yang terjadi setelah perang. Dalam konteks ini, Türkiye dapat mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang tangguh dan fleksibel untuk memoderasi efek samping inflasi dan meminimalkan dampak negatifnya.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam Analisis Kebijakan Türkiye Dalam Upaya Menangani Inflasi Pasca Perang Rusia-Ukraina Tahun 2018-2022. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan hubungan sebab-akibat antara kebijakan Türkiye terkait dedolarisasi dan upaya penanganan inflasi pasca perang Rusia-Ukraina. Dalam metode penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data kualitatif melalui berbagai sumber, seperti dokumen kebijakan, laporan pemerintah, publikasi, dan studi kepustakaan. Data kualitatif tersebut akan dianalisis secara mendalam untuk memahami konteks, alasan, dan implikasi dari kebijakan dedolarisasi yang diimplementasikan oleh Türkiye.

Proses analisis akan melibatkan pengidentifikasian pola, tema, dan hubungan antara kebijakan dedolarisasi dengan upaya penanganan inflasi pasca perang Rusia-Ukraina. Peneliti akan menggunakan pendekatan deduktif untuk menghubungkan teori-teori hubungan internasional dan kebijakan dengan data kualitatif yang ditemukan dalam penelitian ini. Hasil dari analisis ini akan digunakan untuk menyusun

narasi dan penjelasan yang komprehensif tentang hubungan antara kebijakan dedolarisasi Türkiye dan upaya penanganan inflasi pasca perang Rusia-Ukraina. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas kebijakan dedolarisasi dan kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi Türkiye dalam menghadapi inflasi pasca perang.

1.9.1 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian Analisis Kebijakan Türkiye dalam upaya menangani inflasi pasca perang Rusia-Ukraina tahun 2018-2022 mencakup periode empat tahun tersebut, dengan penekanan pada tahun 2022 sebagai tahun krisis yang terpicu oleh perang Rusia-Ukraina. Penelitian ini memfokuskan pada wilayah utama Rusia-Türkiye, termasuk negara-negara yang melakukan kerjasama energi dengan Türkiye. Selain itu, penelitian juga melibatkan negara-negara yang memiliki konflik dan keterkaitan dengan pasar energi Rusia. Dalam analisis kebijakan, penelitian ini meneliti langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Türkiye untuk mengatasi inflasi dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi Türkiye pasca-perang Rusia-Ukraina.

1.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian Analisis Kebijakan Türkiye dalam upaya menangani inflasi pasca perang Rusia-Ukraina tahun 2018-2022, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi beberapa sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, data diperoleh dari sumber publikasi resmi negara terkait, seperti dokumen resmi pemerintah Türkiye dan negara-negara yang terlibat dalam konflik tersebut. Selain itu, jurnal-jurnal penelitian terdahulu dan literatur yang relevan juga digunakan sebagai

sumber data untuk mendukung analisis kebijakan.

Selanjutnya, publikasi media yang berupa wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki akses ke informasi yang diperlukan juga menjadi sumber data yang penting. Data-data tersebut dapat diperoleh melalui situs web resmi organisasi internasional seperti IMF, OECD, dan WorldBank. Sumber data lainnya termasuk laman web resmi seperti www.ecb.europa.eu dan lain sebagainya, yang merupakan sumber publikasi resmi dari negara-negara yang terlibat dan memberikan informasi terkait perkembangan berita internasional. Selanjutnya, data yang diperoleh dari jurnal-jurnal internasional dapat diakses melalui laman jurnal seperti SCOPUS, JSTOR, Research Gate, DOAJ, ScienceDirect, dan Microsoft Academic. Publikasi dari wawancara dengan aktor yang terlibat, seperti anggota pemerintahan, dapat diakses melalui media dan pers resmi Türkiye seperti Anadolu Agency (AA) www.aa.com.tr TRT World www.trtworld.com Hurriyet Daily News www.hurriyetdailynews.com dan lain sebagainya. Dengan menggunakan berbagai sumber data ini, penelitian ini memastikan adanya data yang kredibel, dapat dipertanggungjawabkan, dan relevan untuk melakukan analisis kebijakan terhadap upaya Türkiye dalam menangani inflasi pasca perang Rusia-Ukraina.

1.9.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian "Analisis Kebijakan Türkiye dalam Upaya Menangani Inflasi Pasca Perang Rusia-Ukraina Tahun 2018-2022" mencakup triangulasi data kualitatif. Tahapan pertama dalam analisis data adalah pengklasifikasian data. Data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumen resmi, dan artikel, akan diklasifikasikan berdasarkan tema atau topik yang relevan dengan kebijakan Türkiye dalam menangani inflasi

pasca-perang Rusia-Ukraina. Setelah data diklasifikasikan, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data akan disajikan dalam bentuk narasi, diagram, dan tabel sesuai dengan jenis data yang diperoleh dan kegunaannya. Narasi akan digunakan untuk menjelaskan konteks, kebijakan, dan upaya yang dilakukan oleh Türkiye dalam menangani inflasi. Diagram dan tabel akan digunakan untuk memvisualisasikan data kualitatif yang telah diklasifikasikan, memperlihatkan hubungan antara variabel, dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Türkiye.

Tahap ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini, peneliti akan mengkaji data kualitatif yang telah diklasifikasikan dan disajikan. Melalui proses triangulasi, peneliti akan mencari konsistensi dan keselarasan antara berbagai sumber data yang digunakan. Dengan mengintegrasikan data dari sumber-sumber yang berbeda, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan Türkiye dalam menangani inflasi pasca-perang Rusia-Ukraina. Kesimpulan yang ditarik akan mencakup temuan-temuan utama, pola, dan implikasi kebijakan yang relevan dalam konteks penelitian. Dengan menggunakan teknik triangulasi data kualitatif, penelitian ini dapat menggabungkan berbagai sumber data untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang kebijakan Türkiye dalam menangani inflasi setelah perang Rusia-Ukraina.

1.9.4 Sistematika Penelitian

BAB I : Bagian pendahuluan memuat informasi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

BAB II : Menjelaskan tentang kondisi perekonomian Türkiye pasca perang

antara Rusia-Ukraina, inflasi yang terjadi di Türkiye pasca perang Rusia-Ukraina, kebijakan pemerintah Turk terkait penanganan inflasi pasca perang antara Rusia-Ukraina, serta dedolarisasi oleh pemerintah Türkiye.

BAB III : Berisi hasil penelitian mengenai upaya kebijakan Türkiye dalam upaya menangani inflasi pasca perang Rusia-Ukraina tahun 2018-2022, serta analisis dedolarisasi yang dilakukan pemerintah Türkiye untuk mengatasi inflasi.

BAB IV : Bagian penutup yang mencakup kesimpulan, kekurangan penelitian, dan saran-saran yang dapat diberikan